



Judul : Pengetatan perjalanan dinas ke luar negeri dapat acungan jempol
Tanggal : Senin, 30 Desember 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Pengetatan Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Dapat Acungan Jempol

KEBIJAKAN Pemerintah membatasi perjalanan dinas luar negeri (PDLN) di lingkungan kementerian/lembaga, hingga Pemerintah Daerah (Pemda), mendapat apresiasi banyak pihak. Selain menghemat anggaran negara, kebijakan itu diyakini dapat mempercepat pembangunan diberbagai sektor.

Guru Besar Ilmu Kebijakan Publik Universitas Jenderal Soediman (Unsoed), Prof. Dwi-yanto Indiahono menyatakan, anggaran PDLN merupakan salah satu pos anggaran yang cukup besar di lingkungan kementerian/lembaga hingga Pemda. Pasalnya, PDLN memberangkatkan lebih dari satu orang dan harus menyesuaikan dengan mata uang negara tujuan.

Karenanya, sebut dia, pembatasan PDLN tak sekadar menghemat anggaran negara, tapi dapat mempercepat pembangunan diberbagai sektor. Sebab, pemborosan anggaran yang selama ini terjadi, bisa dialokasikan ke hal-hal yang lebih penting, seperti program padat karya.

"Kebijakan seperti ini, harus diapresiasi. Hal ini menjadi penting, karena dinas luar negeri menyedot anggaran yang besar, tapi minim manfaat," ujar Dwi-yanto dalam keterangannya, dikutip Minggu (29/12/2024).

Lebih lanjut, dia berharap, pembatasan PDLN dikaitkan dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kementerian/lembaga, hingga Pemda. Dengan begitu, kepercayaan publik terhadap Pemerintah bisa meningkat, dan seluruh kebijakan yang dilahirkan dapat mudah diterima masyarakat.

"Ketika akuntabilitas dan transparansi Pemerintah, kepercayaan publik kepada Pemerintah juga akan semakin tinggi. Kondisi ini bukan hanya bagus bagi jalannya Pemerintahan, tapi juga akan mempercepat jalannya pembangunan," tuturnya.

Guru besar Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Mahfud Md juga mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto, memperketat PDLN. Mantan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) ini berharap, Presiden Prabowo juga memberlakukan pembatasan PDLN anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Menurut saya, itu bagian yang bagus dari kebijakan Pak Prabowo. Batasi itu kunjungan kerja. Seperti kata Pak Prabowo, 'untuk apa kunker-kunker lagi? Kita kan sudah tahu masalah kita kok mau cari ke luar negeri'. Itu betul," ujarnya.

Meski DPR merupakan ranah legislatif, lanjut Mahfud, Pemerintah tetap bisa melakukan pembatasan terhadap anggaran PDLN. Caranya, kata dia, melalui kebijakan menteri keuangan (menkeu). "Kan menteri keuangan bisa buat aturan ke DPR," imbuhnya.

Diketahui, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg) menerbitkan surat bernomor B-32/M/S/LN.00/12/2024 tentang Kebijakan Izin Perjalanan Dinas Luar Negeri yang ditandatangani Mensetneg Prasetyo Hadi, Senin (23/12/2024). Lingkup surat ini adalah kementerian, lembaga, badan, daerah dan instansi.

Terdapat sejumlah poin penting dalam aturan pembatasan PDLN. Pertama, aktivitas PDLN bersifat selektif dan berorientasi pada hasil untuk peningkatan kinerja Pemerintah dan pembangunan daerah. Selain itu, PDLN hanya diizinkan untuk kegiatan yang memiliki urgensi tinggi dan relevansi langsung terhadap pencapaian program prioritas nasional.

Pada poin berikutnya, kuota peserta PDLN sangat terbatas. Misalnya, program seperti tugas belajar jenjang diploma hingga post-doktoral, serta kegiatan diplomatik, jumlah peserta akan menyesuaikan permohonan.

"Dalam hal kegiatan PDLN dilakukan sebelum mendapatkan persetujuan Presiden, maka saudara pimpinan kementerian/lembaga/daerah/instansi dan pelaku PDLN yang bersangkutan bertanggungjawab penuh atas segala konsekuensi yang ditimbulkan," demikian petikan kebijakan tersebut.

Di media sosial X, netizen juga mendukung kebijakan pembatasan PDLN. "Dunia sudah serba online, coy. Mau diskusi bisa online. Kirim berkas bisa online. Pesan barang bisa online. Jadi, untuk apa perjalanan dinas luar negeri? sudah betul dibatasi," cuit akun @gromain8290.

"Selama ini, PDLN lebih seperti perjalanan wisata buat aparaturnya atau kepala daerah. Rapat atau kunjungannya cuma sebentar, sisanya jalan-jalan sambil berswafoto untuk diupload di Instagram atau facebook," sentil akun @cahellaccapngulon.

Sementara itu, akun @FRHP16 berharap, lingkup pembatasan perjalanan dinas diperluas hingga ke perjalanan dalam negeri. Sebab, banyak kementerian/lembaga/daerah, yang meboroskan anggaran untuk acara perjalanan dinas dalam negeri.

"Batasi perjalanan dinas ke luar negeri, itu bagus. Tapi, perjalanan dinas di dalam negeri kok masih boleh? Padahal sama-sama menghabiskan anggaran buat bersenang-senang berkedok perjalanan dinas," tulisnya.

"Harusnya, aturan pembatasan perjalanan dinas ke luar negeri, seirama dengan pembatasan perjalanan dinas ke dalam negeri. Itu sama-sama memboroskan anggaran. Pemerintah Pusat pasti punya data, anggaran perjalanan dinas daerah, dan anggaran sebesar itu tak berdampak pada pembangunan daerah," timpal akun @adenkalij35874. ■ ssi.

Kebijakan seperti ini, harus diapresiasi. Hal ini menjadi penting, karena dinas luar negeri menyedot anggaran yang besar, tapi minim manfaat."

PROF. DWIYANTO INDIAHONO